

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan bersinonim dengan “pengaruh”. Pengaruh ialah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di lingkup masyarakat, maka pengaruh ialah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Arti peranan secara implisit menggambarkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.¹ Menurut Soerjono Sukanto, unsur-unsur dari peranan yaitu:²

1. Aspek dinamis dari suatu kedudukan
2. Seperangkat hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari suatu aktivitas yang dijalankan seseorang

¹ Raflan, “Peran Fungsi Dan Kedudukan Bahasa Indonesia”, <https://raflan18.wordpress.com/2017/04/03/peran-fungsi-dan-kedudukan-bahasa-indonesia/>, diakses tanggal 6 Oktober 2019.

² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 441.

Pentingnya peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat diantaranya pada hal-hal sebagai berikut:³

1. Peranan tertentu harus dijalankan jika struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan sebaiknya dilekatkan pada individu yang dianggap mampu menjalankan, mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk menjalankannya.
3. Kadang kala individu dalam masyarakat tidak mampu menjalankan peranannya sebagaimana diharapkan, disebabkan pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu besar.
4. Apabila semua orang mampu menjalankan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang tersebut.

Mengenai peranan, Arimbi Horoepoetri dan Santosa, mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:⁴

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengemukakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada

³ *Ibid.*, 247.

⁴ Arimbi Horoepoetri dan Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), 45.

tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).
5. Peran sebagai terapi, maksudnya bahwa peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peranan ialah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendorong terjadinya suatu hal atau diartikan sebagai pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.

B. Pelatihan

1. Pengertian Pelatihan

Menurut As'ad, pelatihan ialah menyangkut usaha-usaha terencana yang dilakukan agar tercapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, serta sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaannya.⁵

Menurut Sastrodipoero, pelatihan ialah salah satu jenis proses pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pengembangan sumber daya manusia, yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.⁶

Dari beberapa definisi di atas, maka disimpulkan bahwa pelatihan merupakan proses pemberdayaan dan pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) harus mempelajari sesuatu (materi) guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan tingkat

⁵ As'ad, *Psikologi Industri*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 105

⁶ Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 152.

laku dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari guna menopang ekonominya (pendapatan).

2. Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Menurut Rozalena, secara spesifik tujuan dari pelatihan diantaranya ialah:⁷

- 1) Memperbaiki produktivitas dan kinerja karyawan.
- 2) Memperbaiki *output* yang masih kurang hingga mampu mencapai standar.
- 3) Menambah keterampilan, keahlian serta kecakapan karyawan.
- 4) Membiasakan dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi penunjang pekerjaan.
- 5) Sebagai acuan mempersiapkan karyawan untuk promosi. Suatu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan melalui program pengembangan karier yang sistematis.
- 6) Membantu memecahkan masalah operasional.
- 7) Mengefektifkan waktu untuk mencapai *output* serta standar pelatihan dan pengembangan.
- 8) Sarana memupuk kemampuan, minat, bakat dan rasa percaya diri karyawan untuk maju dan berkembang.
- 9) Menumbuhkan loyalitas dan mendukung organisasi mencapai tujuannya.
- 10) Sarana memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi karyawan.

⁷ Agustin Rozalena, *Panduan Praktis Menyusun Pengembangan Karier dan Pelatihan Karyawan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), 111 –112.

Sedangkan manfaat dari pelatihan secara spesifik ialah sebagai berikut:⁸

- 1) Membantu memecahkan masalah efektivitas dan efisiensi organisasi untuk semua sisi.
- 2) Menciptakan peningkatan kuantitas dan kualitas produktivitas serta kinerja yang lebih positif.
- 3) Membentuk sikap dan perilaku loyal, mau bekerja sama dan sama-sama saling menguntungkan.
- 4) Terpenuhinya kebutuhan perencanaan SDM yang unggul dan kompetitif.
- 5) Meminimalisasi beban dan jumlah kecelakaan kerja.
- 6) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan setiap personal karyawan.
- 7) Meminimalisasi hambatan pembelajaran, baik internal maupun eksternal.

3. Konsep Pelatihan

a. Penentuan Kebutuhan Pelatihan

Ada tiga sumber analisis kebutuhan pelatihan yang menjadi pertimbangan yang penting untuk diperhatikan yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Analisis organisasi: analisis ini dapat mendiagnosis kebutuhan kebutuhan akan pelatihan.

⁸ *Ibid.*, 112.

⁹ Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Erlangga, 2012), 204.

- 2) Analisis pekerjaan: membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dengan persyaratan pekerjaan.
- 3) Analisis individu: Pendekatan paling sering digunakan untuk mengidentifikasi individu-individu dalam organisasi dengan menggunakan data dan penilaian kinerja.

Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan yaitu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui dan untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut.

b. Perancangan Pelatihan

Setelah kebutuhan pelatihan ditentukan, berdasarkan analisis yang dilakukan jika ternyata pelatihan dibutuhkan guna mengembangkan para anggota organisasi, maka langkah selanjutnya ialah perancangan pelatihan. Untuk mencapai hasil yang efektif, perlu diperhatikan konsep pembelajaran dalam perancangan pelatihan. Pembelajaran menjadi suatu konsep yang perlu dipahami jika bekerja dalam sebuah organisasi, dikatakan demikian karena pembelajaran merupakan suatu proses psikologi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh para praktisi. Untuk merancang pelatihan, ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain:¹⁰

¹⁰*Ibid.*, 205.

- 1) Kesiapan peserta pelatihan: Para peserta pelatihan yang siap ialah mereka yang mempunyai keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan, ada motivasi, dan efektivitas diri.
- 2) Kemampuan pelatih: *trainer* yang profesional sangat besar pengaruhnya dalam mencapai keberhasilan pelatihan.
- 3) Materi pelatihan: materi pelatihan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pada proses pelatihan. Materi pelatihan yang disampaikan harus sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

c. Pelaksanaan Pelatihan

Metode pelaksanaan pelatihan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:¹¹

- 1) Memotivasi para peserta pelatihan untuk mempelajari keterampilan yang baru.
- 2) Memperlihatkan keterampilan-keterampilan yang diinginkan untuk dipelajari.
- 3) Harus konsisten dengan isi (misalnya, menggunakan pendekatan interaktif untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan interpersonal).
- 4) Memungkinkan partisipasi aktif.
- 5) Memberikan kesempatan berpraktik dan perluasan keterampilan.

¹¹ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:ANDI, 2003), 208.

- 6) Memberikan *feedback* mengenai performasi selama pelatihan.
- 7) Mendorong adanya pemindahan yang positif dari pelatihan ke pekerjaan.
- 8) Efektif dari segi biaya yang digunakan.

d. Penilaian Pelatihan

Menurut Goldstein dan Buxton, evaluasi pelatihan dapat didasarkan pada kriteria dan rancangan percobaan:¹²

1) Kriteria Evaluasi Pelatihan

Ada empat kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari ukuran kesuksesan pelatihan, diantara ialah:

- a) Kriteria pendapat , kriteria ini didasarkan atas bagaimana pendapat peserta pelatihan mengenai program pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini dapat diungkap melalui kuesioner mengenai pelaksanaan pelatihan. Bagaimana pendapat peserta mengenai materi yang telah diberikan pelatih, metode yang digunakan, situasi pelatihan.
- b) Kriteria belajar, kriteria ini dapat diperoleh melalui tes pengetahuan, tes keterampilan yang mengukur skill, dan kemampuan peserta.

¹² Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 59.

- c) Kriteria perilaku, kriteria perilaku dapat diperoleh melalui tes keterampilan kerja, sejauh mana ada perubahan peserta sebelum pelatihan dan setelah pelatihan.
- d) Kriteria hasil, kriteria ini dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti menekan *turnover* , berkurangnya tingkat absen, meningkatkan produktivitas, meningkatnya penjualan, meningkatnya kualitas kerja dan produksi, efektif dan efisien pemakaian alat dan bahan, berkurangnya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas, dan meningkatnya kepuasan kerja.

2) Rancangan Percobaan dalam Evaluasi Pelatihan

Mengevaluasi pelatihan dapat dilakukan dengan membuat rancangan percobaan. Peserta diberikan tes sebelum pelatihan (*pretest*), lalu setelah pelatihan diberikan kembali test penempatan (*posttest*).

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar “sejahtera” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).¹³

Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta *catera* yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, *catera*

¹³ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1978), 887.

merupakan orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁴

Definisi keluarga sejahtera menurut BKKBN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yakni keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa kesejahteraan ialah usaha untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang menempatkan manusia secara terhormat sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan mampu menjalani fungsi sosialnya dengan baik.

¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

¹⁵ Astuti, dkk., "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 4 No. 2, (2 Maret 2017), 21.

2. Indikator Kesejahteraan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:¹⁶

a. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/sekolah.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

¹⁶ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1 (2017), 58.

- b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai paling kurang 8 m^2 untuk tiap penghuni.
 - 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Anggota keluarga umur 10 – 60 bisa, bisa baca tulis latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih (hidup) saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
 - 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio

d. Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs).

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

3. Fungsi dan Tujuan Kesejahteraan

Menurut Friedlander dan Apte, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial terdiri atas hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Fungsi Pencegahan (*preventive*): Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*curative*): Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*development*): Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memberikan sumbangan langsung maupun

¹⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 12.

tidak langsung dalam prosen pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

- d. Fungsi Penunjang (*supportive*): Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurut Suharto, tujuan usaha kesejahteraan sosial ialah sebagai berikut:¹⁸

- a. Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan.

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

4. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra ialah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.¹⁹

Sedangkan menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.²⁰

Tujuan dari ekonomi Islam yaitu tercapainya kemashlahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Qasas ayat 77:²¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

¹⁹ Ika Yunia Fauziyah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7.

²⁰ *Ibid.*, 7.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 315.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Menurut Imam Asy-Syathibi seorang ahli Ushul Fiqh dari Mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Berdasarkan hasil induksi ulama ushul fiqh terhadap *nash*, kelima masalah pokok itu ialah: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *maal* (harta).²²

Berikut ini merupakan tingkatan-tingkatan *mashlahah* sebagaimana yang dimaksud di atas:

- a. *Dlaruriyah*, yaitu keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dlaruriyah* menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.²³

Selanjutnya, *dlaruriyah* terbagi menjadi lima pokok yang biasa disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu :

- 1) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama), memelihara agama dalam tingkatan pokok ialah memelihara serta melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, misalnya menjalankan shalat lima waktu. Jika shalat ini diabaikan, maka akan terancam keutuhan agama.²⁴

²² Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, *Mizani Vol. IX, No. 1, Februari 2015*, 6.

²³ Ika Yunia Fauziyah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 66.

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 227.

- 2) *Hifdzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), menurut Ryandono wujud dari pemeliharaan jiwa ialah dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.²⁵
- 3) *Hifdzu al-Aql* (Memelihara Akal), akal sebagai hal utama yang harus dipelihara. Misalnya adalah diharamkannya untuk mengonsumsi minuman keras (*khamr*) serta anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kegiatan ekonomi harus mampu mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Atas dasar penghormatan akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi harus menggunakan ilmu sebagai modal.²⁶
- 4) *Hifdzu an-Nasl* (Memelihara Keturunan), pada tingkatan *dlaruriyah* ialah seperti disyariatkannya menikah dan larangan berzina. Jika syariat ini tidak dipatuhi, maka akan mengancam keutuhan keturunan.²⁷ Anak-anak wajib diberikan pendidikan sejak dini. Serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Selain itu juga menjamin kesehatan mereka dengan gizi yang cukup.²⁸
- 5) *Hifdzu al-Maal* (Memelihara Harta), menurut Ryandono, usaha dalam memelihara harta ialah meliputi penghasilan yang layak dan adil, mempunyai kesempatan kerja, pekerjaan yang halal dan baik, serta persaingan usaha yang adil.²⁹

²⁵ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 30.

²⁶ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra", *Ahkam*, 1 (Januari 2015), 108.

²⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Mashlahah*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015), 50.

²⁸ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra", 108-109.

²⁹ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ*, 30.

- b. *Hajiyah*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder (sebagai pelengkap dan penunjang).³⁰
- c. *Tahsiniyat*, Seseorang ketika menginjak tingkat *tahsiniyat* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia.

Tahsiniyat juga bisa diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. Seperti masalah etika saat makan, minum, menutup aurat, dan lainnya.³¹

³⁰ Ika Yunia Fauziyah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 68.

³¹ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 78.